



Merawat Keberagaman di Kota Medan: Konstruksi Relasi Agama dan Budaya Lokal

Nurturing Diversity in the City of Medan: The Construction of Relationships between Religion and Local Culture

Paisal Siregar*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Katimin, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Wirman, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

Indonesia is widely recognized as a multicultural society in which religious and cultural diversity shapes everyday social relations. Medan City, a major urban center in North Sumatra, provides a concrete context for examining how diversity is nurtured and maintained through local cultural practices. This article analyzes the construction of relations between religion and local culture in Medan, focusing on how these relations contribute to social harmony in a plural urban setting. The study employs a qualitative descriptive-analytical method based on literature review, policy documents, and relevant previous studies. The findings indicate that religious diversity—encompassing Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism—intersects with ethnic plurality in daily social practices such as communal celebrations, traditional rituals, and economic cooperation. These interactions demonstrate that local culture functions as a practical mechanism for fostering tolerance, mutual respect, national commitment, and non-violence. Despite ongoing challenges related to identity politics and disputes over houses of worship, the article argues that local cultural practices play a mediating role in sustaining interreligious harmony. This study contributes to urban pluralism scholarship by emphasizing diversity as a lived and negotiated process rooted in local cultural dynamics.

ARTICLE HISTORY

Received 19/12/2025

Revised 23/01/2026

Accepted 30/01/2026

Published 04/02/2026

KEYWORDS

Culture; Medan City; pluralism; religion; social harmony.

*CORRESPONDING AUTHOR

✉ paisalsiregar@uisu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v10i1.12698>

PENDAHULUAN

Pluralisme merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sejak awal, bangsa ini terbentuk dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang dirangkum dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Keberagaman tersebut bukan sekadar fakta demografis, melainkan fondasi kehidupan sosial yang terus dinegosiasikan dalam praktik sehari-hari.

Kota Medan, sebagai salah satu pusat urban utama di Indonesia, merepresentasikan dinamika keberagaman tersebut secara konkret. Keberagaman etnis dan agama di kota ini menjadikan Medan sebagai ruang sosial tempat relasi agama dan budaya lokal dirawat, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam kehidupan keseharian, bukan hanya direpresentasikan secara simbolik. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Medan dihuni oleh berbagai etnis besar, seperti Batak (Toba, Karo, Mandailing, Angkola), Melayu, Jawa, Minangkabau, Tionghoa, dan India. Keberagaman etnis ini berjalan seiring dengan pluralitas agama yang dianut masyarakatnya, mulai dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Dalam konteks ini, Medan berfungsi sebagai laboratorium sosial tempat interaksi agama dan budaya lokal berlangsung secara intens dalam berbagai aspek kehidupan (R. Sinaga, [2017](#)).

Keragaman merupakan keniscayaan yang idealnya dikelola sebagai sarana *ta'aruf* dan penguatan peradaban. Namun, dalam praktik sosial, pluralisme tidak selalu berjalan harmonis. Medan pernah mengalami ketegangan sosial yang berkaitan dengan isu pembangunan rumah ibadah, relasi antar etnik, serta politik identitas dalam kontestasi politik lokal. Di tengah potensi konflik tersebut, budaya

lokal kerap berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang melalui praktik gotong royong, pesta adat, dan perayaan lintas komunitas yang menjaga kohesi sosial (Toha & Muna, [2022](#)).

Urgensi kajian ini semakin relevan dalam kerangka kebijakan nasional moderasi beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia menekankan pentingnya sikap moderat dalam kehidupan beragama yang ditandai oleh empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, mengkaji relasi agama dan budaya lokal di Kota Medan memiliki signifikansi akademik sekaligus strategis dalam konteks kebangsaan dan keagamaan.

Dalam kajian sosial-keagamaan, pluralisme tidak semata menunjuk pada keberadaan keragaman, tetapi juga pada sikap menerima dan menghargai perbedaan. Dimensi teologis dan sosial pluralisme menunjukkan bahwa relasi antar agama selalu berkelindan dengan konteks budaya dan struktur sosial tempat agama dipraktikkan (Muhyiddin & Magfiroh, [2023](#)). Di Indonesia, konsep pluralisme kerap dipahami dalam bingkai multikulturalisme yang menekankan pengakuan terhadap keragaman budaya. Koentjaraningrat memandang kebudayaan sebagai sistem nilai dan simbol yang berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial. Dalam kehidupan masyarakat Medan, pluralisme agama dan multikulturalisme etnis saling berkelindan dan membentuk karakter sosial kota yang khas (Masduki, [2016](#)).

Moderasi beragama merupakan konsep kunci dalam kebijakan keagamaan kontemporer di Indonesia. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang dan praktik beragama yang menyeimbangkan pengamalan ajaran agama, penghormatan terhadap tradisi, dan komitmen kebangsaan. Indikator akomodatif terhadap budaya lokal menegaskan bahwa agama dan budaya dapat saling menopang dalam menjaga harmoni sosial (Muhtarom et al., [2020](#)).

Kajian mengenai relasi agama dan budaya lokal telah lama berkembang dalam antropologi agama. Clifford Geertz menunjukkan bahwa agama tidak pernah hadir dalam ruang sosial yang hampa, melainkan selalu berdialektika dengan konteks budaya setempat, sehingga praktik keberagamaan senantiasa bersifat kontekstual (Geertz, [1993](#)). Dalam perspektif Islam, budaya lokal dapat dipahami sebagai bagian dari 'urf selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pandangan ini menegaskan bahwa akomodasi budaya lokal bukanlah bentuk sinkretisme, melainkan aktualisasi ajaran agama dalam realitas sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keberagaman, pluralisme, serta relasi agama dan budaya dalam konteks masyarakat multikultural sebagai landasan penting bagi penelitian ini. Sinaga ([2017](#)) menunjukkan bahwa keberagaman etnis, agama, dan budaya di Kota Medan dapat berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat persatuan masyarakat pluralis melalui reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Zuhrah dan Yumasdaleni ([2021](#)) menegaskan peran strategis masjid dalam menjaga harmoni dan moderasi beragama melalui dakwah yang toleran, inklusif, adaptif, dan berakar pada warisan sejarah. Rambe dan Sari ([2022](#)) mengungkapkan bahwa FKUB Kota Medan berperan aktif memperkuat moderasi beragama melalui edukasi dan dialog lintas agama yang berkelanjutan. Lubis et al. ([2023](#)) menemukan bahwa kerukunan antar umat beragama di Kampung Madras terwujud melalui kerja sama, musyawarah, toleransi pembangunan rumah ibadah, dan kepedulian sosial yang didukung oleh kesadaran individu, perkawinan, dan kekerabatan. Sementara itu, Damanik ([2024](#)) menunjukkan bahwa kehidupan multikultural Medan terbentuk melalui interaksi historis, ekonomi, dan globalisasi yang memungkinkan kota ini beradaptasi secara dinamis serta menegosiasikan relasi antara tradisi dan modernitas.

Berbeda dari kajian pluralisme perkotaan yang cenderung deskriptif atau normatif, artikel ini menghadirkan pembacaan pluralisme Kota Medan sebagai proses kultural yang dirawat melalui dialektika aqidah Islam dan budaya lokal dalam kerangka moderasi beragama. Pendekatan ini menempatkan budaya lokal sebagai aktor sosial yang memiliki daya mediasi dalam mengelola perbedaan melalui praktik keseharian dan negosiasi makna, bukan sekadar latar normatif atau instrumen kebijakan. Perpaduan perspektif teologis dan kultural, penelitian ini mengisi celah studi pluralisme perkotaan yang sebelumnya lebih menekankan nilai kebangsaan, institusi keagamaan, atau dinamika struktural, sekaligus memperluas *state of the art* kajian moderasi beragama berbasis konteks lokal Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana konstruksi relasi antara agama dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat Kota Medan, dan (2) bagaimana budaya lokal berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di tengah pluralisme perkotaan. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi aqidah dan teologi sosial Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi penguatan harmoni sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika relasi antara agama dan budaya lokal di Kota Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena sosial-keagamaan yang bersifat kompleks, kontekstual, dan sarat makna. Secara spesifik, penelitian ini diposisikan sebagai kajian konseptual (*theoretical review*) dengan pendekatan sosial-kultural yang mempertimbangkan konteks historis perkembangan Kota Medan sebagai ruang multikultural. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana relasi agama dan budaya lokal dikonstruksi, dimaknai, dan dirawat dalam praktik sosial, tanpa mengandalkan pengumpulan data lapangan primer.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif berupaya menangkap realitas sosial dari sudut pandang para aktor dengan cara mendeskripsikan pengalaman, nilai, dan makna yang mereka konstruksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, analisis difokuskan pada bagaimana ajaran agama dan ekspresi budaya lokal dipahami dan dinegosiasikan dalam kerangka aqidah Islam dan moderasi beragama di Kota Medan. Analisis menempatkan Kota Medan sebagai ruang sosial multikultural yang dibentuk oleh keragaman etnis, agama, dan tradisi, sehingga relasi agama dan budaya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan historis yang melingkupinya (Harahap, [2020](#)).

Sumber data penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder yang meliputi literatur akademik, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan riset, serta dokumen resmi, termasuk Indeks Kota Toleran dan kebijakan Kementerian Agama terkait moderasi beragama. Data historis dan etnografis mengenai tradisi budaya dan perayaan keagamaan di Kota Medan juga digunakan untuk memperkaya analisis konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan telaah dokumen terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara tematik dengan menggunakan kerangka teori pluralisme, multikulturalisme, teori ruang publik, serta konsep *wasathiyyah* Islam sebagai perspektif normatif keislaman.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari literatur akademik, laporan lembaga riset seperti Setara Institute, dan hasil kajian sebelumnya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak diarahkan pada generalisasi statistik, melainkan pada pengembangan pemahaman konseptual mengenai konstruksi relasi agama dan budaya lokal di Kota Medan serta implikasinya bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia (Sulistiyo, [2023](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pluralisme Sosial-Keagamaan dalam Ruang Publik Kota Medan

Kota Medan merupakan ruang sosial multikultural dengan tingkat keberagaman etnis, agama, dan budaya yang tinggi. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Medan tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga sebagai arena perjumpaan intens antar berbagai identitas sosial dalam satu ruang publik yang sama. Kondisi ini menjadikan pluralisme di Medan bersifat dinamis dan terus dikonstruksi melalui praktik sosial sehari-hari.

Keberagaman etnis di Kota Medan membentuk struktur sosial yang relatif cair, di mana identitas tidak hadir secara eksklusif, melainkan saling berinteraksi dan beradaptasi. Data Badan Pusat Statistik Kota Medan menunjukkan komposisi penduduk yang terdiri atas etnis Batak (Toba, Karo, Mandailing, Angkola), Jawa, Minangkabau, Melayu, Tionghoa, Aceh, Nias, dan India Tamil. Keragaman ini memungkinkan terjadinya negosiasi identitas secara berkelanjutan, terutama dalam ruang publik seperti pasar, sekolah, dan lingkungan permukiman (Kunarsih & Tampilen, [2022](#)).

Dari perspektif keagamaan, Medan menunjukkan konfigurasi plural yang relatif seimbang, dengan Islam sebagai agama mayoritas, diikuti Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberadaan masjid, gereja, vihara, dan kuil yang berdiri berdampingan secara geografis mencerminkan praktik toleransi yang tidak hanya simbolik, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam tata ruang kota. Studi kasus dapat dilihat pada kawasan Masjid Raya Al-Mashun, Gereja Katedral Medan, dan Vihara Gunung Timur yang berada dalam satu lanskap urban, di mana kedekatan spasial tersebut membentuk pola saling menghormati dalam penggunaan ruang publik dan pelaksanaan ritual keagamaan, terutama pada momentum hari besar keagamaan masing-masing komunitas.

Dalam sektor ekonomi, pasar-pasar tradisional seperti Pasar Petisah, Pusat Pasar, dan Pajak USU berfungsi sebagai ruang interaksi lintas identitas. Di ruang ini, relasi sosial dibangun atas dasar kepentingan ekonomi bersama dan rasionalitas praktis, sehingga membentuk etika toleransi yang bersifat pragmatis dan berkelanjutan (Zuhrah & Yumasdaleni, [2021](#)). Interaksi ekonomi lintas etnis dan agama ini memperkuat kohesi sosial sekaligus mereduksi potensi konflik berbasis identitas.

Pluralisme sosial-keagamaan di Medan tidak sepenuhnya bebas dari ketegangan. Isu pembangunan rumah ibadah dan menguatnya politik identitas dalam kontestasi politik lokal menunjukkan bahwa praktik moderasi beragama masih menghadapi keterbatasan struktural. Hal ini menegaskan bahwa pluralisme tidak dapat semata-mata dikelola melalui regulasi formal, melainkan membutuhkan penguatan pada level kultural dan sosial yang lebih mengakar.

Dalam perspektif teologis Islam, pluralisme di Medan dapat dipahami sebagai manifestasi prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Alquran menegaskan bahwa keberagaman merupakan *sunnatullah* yang bertujuan untuk saling mengenal, sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Hujurāt [49]:13. Prinsip ini memberikan landasan normatif bagi praktik toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan yang terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat Medan.

Ruang publik di Kota Medan berperan sebagai medium penting dalam mereproduksi dan memperkuat pluralisme tersebut. Mengacu pada konsep ruang publik Jürgen Habermas, pasar tradisional, perayaan budaya dan keagamaan, serta organisasi sosial dan kepemudaan berfungsi sebagai arena dialog sosial yang relatif egaliter. Melalui interaksi di ruang-ruang ini, toleransi dan solidaritas lintas agama dibangun secara organik dari bawah, sehingga pluralisme di Medan dapat dipahami sebagai *living pluralism* yang dihidupi melalui praktik sosial sehari-hari.

Relasi antara agama dan budaya lokal di Kota Medan terbentuk melalui proses simbiosis dan dialektika yang berlangsung secara historis dan sosial. Agama tidak hadir sebagai entitas normatif yang terpisah dari konteks budaya, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan tradisi lokal dalam praktik kehidupan sehari-hari, sehingga melahirkan bentuk keberagamaan yang kontekstual dan khas (Malik & Busrah, [2021](#)).

Pada masyarakat Batak, struktur sosial *Dalihan Na Tolu* berfungsi sebagai kerangka etis relasi sosial yang kemudian diadaptasi oleh komunitas Muslim maupun Kristen dalam berbagai ritual adat, seperti pernikahan dan kematian. Pada masyarakat Mandailing dan Angkola, prinsip *adat dohot ugamo ibarat sintong dohot sinambu* menegaskan hubungan organik antara adat dan agama Islam. Sementara itu, budaya Melayu Deli merefleksikan simbiosis agama dan budaya melalui prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*, yang memungkinkan tradisi lokal tetap lestari tanpa dipandang bertentangan dengan ajaran agama (D. R. Prayoga et al., [2021](#)).

Pada masyarakat Karo, sistem *rakut sitelu* tetap dipertahankan sebagai mekanisme harmoni sosial meskipun terjadi pergeseran dan keberagaman agama. Struktur ini berfungsi sebagai penyangga relasi sosial lintas iman dalam berbagai ritus adat. Pada komunitas Tionghoa Medan, tradisi Imlek, Cheng Beng, dan Cap Go Meh tidak hanya menjadi ekspresi spiritual, tetapi juga simbol identitas kultural yang mengalami akulturasi dengan budaya lokal dan diterima secara luas oleh masyarakat kota (Daulay et al., [2023](#)).

Proses simbiosis dan dialektika antara agama dan budaya lokal tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Perdebatan mengenai legitimasi praktik adat tertentu—seperti ritual *mangupa*, pesta adat besar, atau tradisi yang berakar pada kepercayaan lokal—menunjukkan adanya perjumpaan antara nilai normatif agama dan praktik budaya historis. Namun, ketegangan tersebut justru membuka ruang negosiasi melalui musyawarah adat, fatwa keagamaan lokal, dan reinterpretasi nilai budaya agar tetap selaras dengan ajaran agama (Pujiono, [2019](#)).

Melalui proses simbiosis dan dialektika tersebut, agama dan budaya lokal di Kota Medan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kohesi sosial dan merawat keberagaman. Budaya lokal bertindak sebagai mediator yang memungkinkan integrasi nilai keagamaan dan realitas sosial, sehingga pluralisme di Medan tidak bersifat statis, melainkan adaptif, kontekstual, dan resilien dalam menghadapi dinamika perubahan sosial.

Kontribusi Budaya Lokal dalam Penguatan Moderasi Beragama di Tengah Pluralisme Perkotaan Kota Medan

Kota Medan sebagai salah satu pusat urban multikultural terbesar di Indonesia memiliki dinamika sosial yang kompleks karena menjadi ruang perjumpaan berbagai etnis, seperti Jawa, Batak (Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola), Minangkabau, Aceh, Tamil, Tionghoa, serta komunitas Melayu sebagai penduduk awal. Kompleksitas ini menempatkan Medan sebagai miniatur pluralisme Indonesia sekaligus menciptakan tantangan sosial berupa potensi konflik yang bersumber dari kompetisi ruang sosial, kontestasi simbol keagamaan, perbedaan orientasi budaya, ketimpangan ekonomi, dan menguatnya politik identitas di tingkat lokal. Dalam kondisi tersebut, budaya lokal berperan sebagai mekanisme sosial yang menopang praktik moderasi beragama di tengah pluralisme perkotaan.

Potensi konflik di Medan termanifestasi dalam berbagai bentuk gesekan horizontal, seperti sengketa pendirian rumah ibadah, perebutan ruang publik untuk aktivitas keagamaan dan budaya, serta ketegangan antara praktik adat dan sensitivitas teologis kelompok tertentu. Konflik laten juga muncul melalui stereotip etnis dan ketimpangan distribusi akses ekonomi antar komunitas. Urbanisasi, pertumbuhan kawasan permukiman baru, serta terbentuknya *enclave* etnis di sejumlah

wilayah meningkatkan risiko fragmentasi sosial karena setiap kelompok membawa tradisi, struktur otoritas, dan orientasi religius yang tidak selalu sejalan (Wirman & Ababil, [2023](#)). Dalam situasi ini, budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas kultural, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengarahkan perbedaan menuju pola interaksi yang lebih moderat.

Kasus sengketa pendirian rumah ibadah di beberapa kawasan permukiman Medan memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya dipicu oleh perbedaan teologis, tetapi juga oleh persoalan administratif, kepadatan ruang, dan persepsi dominasi simbolik di ruang publik. Konflik semacam ini cenderung mereda melalui mekanisme resolusi berbasis budaya lokal, seperti musyawarah adat, dialog lintas tokoh agama, serta intervensi komunitas setempat. Pola tersebut menunjukkan kontribusi langsung budaya lokal dalam memediasi konflik dan memperkuat praktik moderasi beragama di tingkat akar rumput.

Masyarakat Medan memiliki modal sosial dan budaya yang relatif kuat dalam menjaga kohesi sosial. Tradisi musyawarah lintas komunitas, keterlibatan tokoh adat dan pemuka agama sebagai mediator, serta praktik diplomasi kultural berfungsi sebagai instrumen nonformal dalam merawat harmoni sosial. Falsafah *Dalihan Na Tolu* dalam masyarakat Batak, nilai *sapantun* dan *semalu* dalam budaya Melayu, serta konsep *rakut sitelu* dalam komunitas Karo menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya mengatur relasi sosial internal, tetapi juga membentuk etika moderasi dalam relasi lintas agama dan etnis (Damanik, [2024](#)).

Kontribusi budaya lokal dalam penguatan moderasi beragama juga tampak pada level institusional. Pemerintah daerah memfasilitasi mekanisme dialog melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta forum komunikasi lintas etnis seperti Paguyuban Nusantara. Kehadiran forum-forum ini menunjukkan bahwa moderasi beragama di Medan tidak digerakkan semata oleh regulasi formal, melainkan bertumpu pada legitimasi kultural dan jaringan sosial masyarakat lokal.

Kontribusi budaya lokal dalam memperkuat moderasi beragama masih menghadapi keterbatasan. Resolusi konflik berbasis budaya terbukti efektif pada level komunitas, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural, terutama ketimpangan ekonomi dan politisasi identitas yang terus direproduksi dalam ruang politik lokal. Kondisi ini menegaskan kebutuhan akan dukungan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial dan kultural masyarakat Medan (Pratama & Harahap, [2024](#)).

Moderasi beragama berfungsi sebagai kerangka analitis yang menjembatani relasi antara agama dan budaya lokal. Konsep ini tidak berhenti sebagai wacana normatif negara, melainkan hidup melalui adaptasi budaya, negosiasi nilai, dan kompromi sosial. Prinsip komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal terartikulasikan dalam praktik keseharian masyarakat Medan, terutama melalui penyesuaian ritual adat, perayaan budaya, dan etika pergaulan lintas iman (Rambe et al., [2023](#)).

Pada masyarakat Batak Muslim dan Melayu, kontribusi budaya lokal terhadap moderasi beragama tercermin dalam adaptasi ritual adat pernikahan dan kematian agar selaras dengan prinsip syariat. Di komunitas Karo dan Tionghoa, harmonisasi agama dan budaya tampak dalam pengelolaan ritual keluarga dan perayaan budaya yang diarahkan pada pola hidup saling menghormati antar umat beragama (Fitriani, [2020](#)). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa budaya lokal berfungsi sebagai medium efektif dalam menerjemahkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kehidupan sosial yang konkret.

Kontribusi budaya lokal dalam penguatan moderasi beragama di Kota Medan bekerja secara nyata melalui mekanisme sosial, praktik kultural, dan jaringan kelembagaan. Kemampuan Medan

menjaga stabilitas sosial di tengah potensi konflik memperlihatkan bahwa moderasi beragama beroperasi secara faktual melalui kombinasi budaya lokal, relasi sosial, dan dinamika institusional. Temuan ini menegaskan posisi Medan sebagai laboratorium sosial penting bagi pengembangan kajian moderasi beragama berbasis konteks lokal dalam masyarakat plural perkotaan (Arsyad et al., [2025](#)).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Kota Medan merepresentasikan pluralisme Indonesia bukan semata karena tingginya keragaman agama, etnis, dan budaya, melainkan karena relasi antar identitas tersebut dikonstruksi secara aktif dalam praktik sosial sehari-hari. Hubungan antara agama dan budaya lokal di Medan menunjukkan pola simbiosis yang saling menguatkan sekaligus dialektika yang memunculkan perdebatan normatif antara adat dan akidah. Pola ini tampak dalam perayaan keagamaan lintas komunitas, interaksi ekonomi di ruang publik, serta keberlanjutan praktik adat yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Di tengah potensi konflik, terutama terkait pendirian rumah ibadah dan klaim ruang publik, moderasi beragama berbasis nilai *wasathiyyah* Islam berfungsi sebagai kerangka konseptual yang efektif dalam merawat harmoni sosial. Posisi ini menempatkan Medan sebagai laboratorium sosial penting bagi pengembangan model relasi agama dan budaya yang kontekstual dalam masyarakat multikultural.

Penelitian selanjutnya perlu memperkuat dimensi empiris melalui studi lapangan dan pendekatan komparatif dengan kota-kota plural lain guna memperdalam pemahaman tentang variasi praktik moderasi beragama. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama perlu mengembangkan program moderasi beragama yang lebih berbasis komunitas lokal dengan mengoptimalkan peran FKUB sebagai ruang edukasi publik dan mediasi sosial. Tokoh agama dan budaya diharapkan memperluas dialog lintas iman melalui aktivitas budaya bersama yang menegaskan kompatibilitas agama dan kearifan lokal. Pada level masyarakat, penguatan literasi toleransi dan sikap saling menghormati perlu ditanamkan secara berkelanjutan sebagai fondasi kehidupan plural yang inklusif.

REFERENSI

- Arsyad, A., Hasibuan, W. A., & Primadani, R. (2025). Manajemen lembaga dakwah FKUB dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Medan. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 3(4), 10–17. <https://doi.org/10.51178/khazanah.v3i4.2308>
- Daulay, A. F., Basyr, M., Citra, Y., Lestari, I., & Habibah, H. R. (2023). Implementasi pengaruh moderasi beragama pada masyarakat Karo Desa Simacem Kabupaten Karo Sumatera Utara kawasan relokasi Siosar Puncak 2000. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 4(1), 225–236. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v4i1.5279>
- Damanik, F. H. S. (2024). Kehidupan multikultural di Kota Medan: Dinamika, tantangan, dan peluang. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 60–67. <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8503>
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan toleransi antar umat beragama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179–192. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>
- Geertz, C. (1993). Religion as a cultural system. In *The interpretation of cultures: Selected essays* (pp. 87–145). Fontana Press.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Kunarsih, S., & Tampilen, T. (2022). Wilayah segregasi etnik di Kota Medan. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 53–58. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5080>
- Lubis, N. S., Irwansyah, & Kamal, A. (2023). Kerukunan antar umat beragama di Kampung Madras Kecamatan Medan Polonia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 714–719. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5350>
- Malik, A., & Busrah, B. (2021). Relasi pemerintah dan akademisi dalam isu moderasi beragama di Indonesia. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 120–131. <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i2.9167>
- Masduki, H. (2016). Pluralisme dan multikulturalisme dalam perspektif kerukunan antar umat beragama. *Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment*, 9(1), 15–24. <https://doi.org/10.21107/djs.v9i1.3741>

- Muhtarom, A., Fuad, S., & Latief, T. (2020). *Moderasi beragama*. Yayasan Talibuana Nusantara.
- Muhyiddin, A. S., & Magfiroh, S. N. (2023). Multikulturalisme sebagai landasan dalam mengelola keberagaman budaya dan agama di masyarakat yang plural. *IDRIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(2), 151–169.
- Pratama, T. A., & Harahap, N. (2024). Peran komunikasi interkultural dalam penguatan moderasi beragama pada masyarakat Kota Medan (Analisis FKUB di Medan). *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(2), 2081–2095. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.819>
- Prayoga, D. R., Leontinus, G., Ginting, T. D., Damayani, W. N., Rohani, & Z, S. (2021). Kerukunan hidup masyarakat dalam bingkai multikultural di Kampung Madras Kota Medan. *Jurnal Samudra Geografi*, 4(1), 30–38. <https://doi.org/10.33059/jsg.v4i1.3053>
- Prayoga, M. A., Ramadhan, M. I., Fakar, S. H., Harahap, R. D., & Abdul Ghaffar. (2021). Moderasi beragama antara umat Muslim dan Kristen di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak. *Islam & Contemporary Issues*, 1(2), 24–27. <https://doi.org/10.57251/ici.vii2.77>
- Pujiono, Mhd. (2019). Cerminan multikulturalisme dalam interferensi dan integrasi lintas bahasa di Kota Medan. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(2). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.722>
- Rambe, T., & Sari, S. M. (2022). Moderasi beragama di Kota Medan: Telaah terhadap peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 5(2), 84–92. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i2.12630>
- Rambe, T., Mawardi, M., & Mayasari, S. (2023). Rumah moderasi beragama di PTKIN: Potret kebijakan dan strategi mewujudkan beragama moderat di perguruan tinggi. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 214–229. <https://doi.org/10.22373/ari.v3i2.19826>
- Sinaga, M. H. S., Maulana, A., Akbar, I., Lubis, M. A., Haikal, H., & Siregar, R. M. (2022). Peran Kementerian Agama dalam moderasi beragama. *Jurnal Al-Qiyam*, 3(1), 21–25. <https://doi.org/10.33648/alqiyam.v3i1.179>
- Sinaga, R. (2017). Reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat pluralis di Kota Medan. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(2), 49–55. <https://doi.org/10.24114/ph.v2i2.9091>
- Sipahutar, R. E., Kalsum, U., Juliana, Tanjung, M. A. K., Budi, R. S., & Warsodirejo, P. P. (2024). Sosialisasi kerukunan umat beragama dan PBM No. 9 Tahun 2006 dengan pengurus FKUB kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Deli Serdang. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 7(1), 485–491. <https://doi.org/10.30743/best.v7i1.8938>
- Siregar, E. S. (2022). Sikap moderasi beragama komunitas Islam dan Kristen: Studi di Kelurahan Tegal Sari Mandala II. *Islam & Contemporary Issues*, 2(2), 37–43. <https://doi.org/10.57251/ici.v2i2.540>
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Toha, M., & Muna, F. (2022). Moderasi Islam dan aliran pemikiran pluralisme agama. *Journal of Education and Religious Studies (JERS)*, 2(1), 22–28. <https://doi.org/10.57060/jers.v2i01.36>
- Wirman, W., & Ababil, H. (2023). Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menangani daerah rawan konflik di Kota Medan. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 3(2), 180–189. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v3i2.2916>
- Zuhrah, F., & Yumasdaleni. (2021). Masjid, moderasi beragama dan harmoni di Kota Medan. *Harmoni*, 20(2), 317–329. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.512>